



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI ZULKARNAIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **195923**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.570.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/224 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 778.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 34.500.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, GPX 250CC TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 53.500.000
4. MOTOR, YAMAHA YZ250FX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
5. MOBIL, TOYOTA JEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 153.750.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	345.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.846.750.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.846.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.